

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Qisthi Press. Jakarta. 2014.
- Ardiansyah. *Hukum Perizinan*. Cetakan Pertama. Deepublish. Yogyakarta. 2023
- Butar-Butar, Franky. dkk. *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan batubara*. Ctk. pertama. Airlangga University Press. Surabaya. 2022.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan keenam. Rajawali Pers. Jakarta. 2011.
- Kurniawan. *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*. Cetakan Pertama. Genta publishing. Yogyakarta. 2014.
- Marwan, Awaludin (Editor). *Ilmu Hukum*. Ctk. kedelapan. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Ctk. kelima. Maha Karya Pustaka. Yogyakarta. 2024.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan pertama. Mataram University Press. Mataram. 2020.
- Nandang Sudrajad. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*. Ctk. Pertama. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 2010.
- Sapto Nugroho, Sigit. Dkk. dkk. *Hukum Sumber Daya Alam Perspektif Keadilan Inter-Antar Generasi*. Cetakan pertama. Taujih. Kartosuro. 2019.
- Tarmizi (Editor). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Dalam Tarmizi. Ctk. Pertama. Sinar Grafika. Jakarta. 2012.
- Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. ctk. Kelima. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2010.
- Subekti, Rahayu. dkk. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. Cetakan pertama. Widina Bhakti Persada Bandung. Bandung. 2022.
- Sudrajad, Nandang. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 2010
- Supramono, Gatot. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. Ctk. Pertama. Rineka Cipta. Jakarta. 2012.

Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ideas Publishing. Gorontalo. 2017.

## **JURNAL**

Aryadi, G. dkk. “Penerapan Kumulasi Sanksi Eksternal Dalam Penegakan Hukum Pidana Korupsi Oleh Pejabat Pemerintah di Kabupaten Sleman”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 4 No 2. Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga. 2020.

Aminullah, Muhammad Soleh. Dkk. “Asas-Asas Penyelenggaraan negara Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam”. *Jurnal Hukum keluarga dan Pemikiran Hukum Islam*. Vol 4 No. 1. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2024.

Asna, Royatul, dkk. “Tinjauan Hukum Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Terhadap Investasi Berbasis OSS (Online Single Submission)”. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Hukum*. Vol. 5 No. 1. Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Salatiga. 2025. Hlm 483.

Asyikin, Nehru. “Pengawasan Publik Terhadap Pejabat Publik yang Melakukan Tindakan Korupsi: Perspektif Hukum Administrasi”. *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol 4 No. 1. Pusat Kajian HAM dan Pelayanan Publik. Yogyakarta 2020.

Darongke, Friskilia Junisa Bastiana, dkk. “Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia”. *Lex Privatum*. Vol 10. No. 3. Universitas Sam Ratulangi. 2022

Gandaria, Robertho Yanflor. “Implementasi Asas-Asas Umum pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam Mewujudkan Prinsip *Good Governance And Clean Government* di Pemerintahan Daerah”. *Lex Administratum*. Vol 3 No. 6. Universitas Sam Ratulangi. Manado. 2015.

Hudjon, Philipus. M. “Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup”. *Jurnal Hukum*. Vol 2 No. 2. Surabaya. 1995.

Kautsar, Izzy Al, dkk. “Sistem Hukum Modern Lawrances M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial Ke Digital”. *Jurnal Sapientia Et Virtus*. Vol 7 No 2. Yogyakarta. 2022.

- Karunia, Ana Aniza. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedmen". *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*. Vol 10 No 1. Universitas Sebelas Maret. Solo. 2022
- Kindangen, Felicia Nathania, dkk. "Penetapan Wilayah Pertambangan dalam Melakukan Perjanjian Usaha Pertambangan Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023". *Lex Administratum*. Vol 12 No. 5. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. 2024
- Laila, Umar. Dkk. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pelayanan Publik Dalam Proses Pengurusan Perizinan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 di Kota Palopo". *Jurnal Tociung Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 4. Palopo. 2024.
- Lintar, Suiton Ali, dkk. "Implementasi Pemberian Izin Pertambangan di Wilayah Provinsi Bengkulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara". *Petahana: Journal of Social Politics and Public Administration*. Vol 1. No. 2. Yayasan Darussalam Bengkulu. 2024.
- Mahanani, Anajeng Esri Edhi. "Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia". *Jurnal Yustika*. Vol 22 No. 1. Surabaya. 2019.
- Marilang. "Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang". *Jurnal Konstitusi*. Vol 9 No. 2. Jakarta. 2012
- Muchlisin. "Konsep Perizinan Dalam Kaidah Hukum Islam". *Jurnal Ilmu Syariah*. Vol 3 No. 2. Institut Agama Islam Negeri Madura. Madura. 2022.
- Muhammad, Taufiq. "Hak Menguasai Negara di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara di Era OTODA". *Jurnal Equitable*. Vol 8. No. 2. Riau. 2023.
- Nalle, Victor Imanuel Williamson. "Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba". *Jurnal Konstitusi*. Vol 9 No. 3. 2012.
- Nalle, Victor Imanuel W. "Asas Contrarius Actus Pada Perpu Ormas: Kritik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hak Asasi Manusia". *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 4. No. 4. Bandung. 2017.

- Puluhulawa, Fenty. “Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol 11. No. 2. Fakultas Hukum UNSOED. 2011.
- Putra, I Gusti Lanang Surya. dkk. “Implementasi Ketentuan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik (Studi Kasus Pada Kedai Kopi Yang Memutarkan Lagu Dan/Atau Musik Di Wilayah Kota Singaraja)”. *Jurnal Ilmu Hukum Sui generis*. Denpasar. 2023.
- Rachman, Cipta IndraLestari. Dkk. “Persetujuan Lingkungan Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara”. *Jurnal Legal Reasoning*. Vol 6 No. 1. Fakultas Hukum Universitas Pancasila. 2023.
- Ahmad Redi. dkk. “Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia”. *Undang: Jurnal Hukum*. Vol 4 No 2. Jakarta. 2021.
- Salinding, Marthen B. “*Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat*”. *Jurnal konstitusi*. Vol 16 No. 1. Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. 2018.
- Sarungu , Gabriella Tiku. “Dampak Kekeliruan dalam Pemilihan Kode KBLI Pada Akta Pendirian PT Bagi Notaris dan Pelaku Usaha”. *Unes Law Review*. Vol 6. No. 3. Universitas Negeri Semarang. 2024.
- Setiawan, Muhammad Irwan. “Pemanfaatan Sumber daya Alam Dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Religion: Jurnal agama, sosial, dan budaya*. Vol 1 No 4. Universitas Lambung Mangkurat. Banjarmasin. 2023
- Siregar, Anwar Habibi. “Pengelolaan Barang Tambang dalam Hukum Islam dan Hukum Positif”. *Jurnal Perbandingan Hukum*. Vol. 2 No. 2. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta. 2014
- Susanto, Sri Nur Hari. “Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi”. *Administrative Law & Governance Journal*. Vol 2. Issue 1. 2019
- Sutrisno, dkk. “Pelaksanaan kebijakan Pendelegasian pemberian Perizinan di Bidang Mineral dan Batubara Pada Pemerintahan Daerah di Kabupaten Gresik”. *SAP*. Vol. 2. No. 3. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo Surabaya. 2024.

Widodo, Sri. Dkk. “sosialisasi dan pembinaan kaidah pertambangan yang baik bagi penambang dan masyarakat lingkaran tambang batubara di Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan” *Jurnal Tepat*. Vol 6. No. 1. Makassar. 2023.

### **MAKALAH**

Wahidmurni. “Teknik Penyusunan Proposal penelitian”. Makalah disampaikan dalam perkuliahan Fakultas Ilmu tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang. 2020.

### **PERATURAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana sudah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara..

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana sudah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha  
Pertambangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan  
Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian  
Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang  
Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan  
Mineral dan Batubara dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang  
Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan  
Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Tentang  
Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan  
Berusaha Berbasis Resiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

Peraturan Gubernur D.I.Y Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan  
Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral  
Bukan Logam Jenis Tertentu, Dan Batuan.

### **PUTUSAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-VI/2008.

## **ARTIKEL**

Fazrul, Ihsan. “Apa Itu Tanah Urug? Ini Fungsi, Kriteria, Jenis, dan harganya”. Terdapat dalam laman <https://www.99.co/id/panduan/tanah-urug/> diakses pada tanggal 11 Januari 2025 Pukul 20.00 WIB.

Handoko, Triyo. “Warga Gunungkidul Gugat Tambang untuk Tol Jogja-Solo [1]”. Terdapat pada <https://www.mongabay.co.id/2024/08/05/warga-gunungkidul-gugat-tambang-untuk-tol-jogja-solo-1/>. Diakses pada tanggal 20 desember 2024.

Dinaspupr. “Begini Cara Pengurugan Tanah Yang Benar”. Terdapat pada <https://dinasupr.bandaacehkota.go.id/2020/06/23/begini-cara-pengurugan-tanah-yang-benar/>. Diakses pada 7 Januari 2025 pukul 16.00 WIB.

Munawaroh, Nafiatul. “Tata Cara Permohonan Surat Izin Penambangan Batuan”. Terdapat dalam [https://www.hukumonline.com/klinik/a/tata-cara-permohonan-surat-izin-penambangan-batuan-sipb-lt627b7bf00b3fd/#\\_ftnref4](https://www.hukumonline.com/klinik/a/tata-cara-permohonan-surat-izin-penambangan-batuan-sipb-lt627b7bf00b3fd/#_ftnref4) diakses pada tanggal 10 Januari 2025 pukul 19.20 WIB

Sunartono. “Tol Jogja-Bawen Habiskan 3 Juta Meter Kubik Tanah Uruk, Ditambang di Area DIY”. Terdapat pada <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/01/26/510/1124343/tol-jogja-bawen-habiskan-3-juta-meter-kubik-tanah-uruk-ditambang-di-area-diy>. Diakses pada 26 Desember 2024 pukul 23.00 WIB.

---

. “Tanah urug: Fungsi, Manfaat, dan cara penerapannya”. Terdapat pada <https://dibacatulis.wordpress.com/2023/08/22/tanah-urug-fungsi-manfaat-dan-cara-penerapannya/>. Diakses pada 26 Desember 2024 pukul 21.00 WIB.

---

. “Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia”. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Terdapat pada laman

<https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko>. Diakses pada 28 Desember 2024 pukul 12.00 WIB.

\_\_\_\_\_. “Penambangan Tanah Urug di Proyek Tol Jogja-Solo Disoal”. Terdapat pada <https://radarjogja.jawapos.com/gunungkidul/65763701/penambangan-tanah-urug-proyek-tol-jogjasolo-disoal>. Diakses pada 26 Desember 2024 Pukul 22.00 WIB.

\_\_\_\_\_, “Progres Pembangunan Jalan tol Yogya-Solo: Penambangan Ilegal dan Pelanggaran Tata ruang”. Terdapat pada <https://jogja.voi.id/aktual/335442/progres-pembangunan-jalan-tol-yogya-solo-penambangan-ilegal-dan-pelanggaran-tata-ruang>. Diakses pada tanggal 14 Januari 2024 pukul 19.46 WIB

\_\_\_\_\_, “Al-Baqarah Surah: 29, Qur’an Kementerian Agama”. Terdapat pada laman <https://quran.kemenag.go.id/>. Diakses pada 3 Maret 2025 pukul 12.00 WIB.

## **SKRIPSI**

Aryanda, Rama. “Penambangan Batu Ilegal Menurut UU Nomor 4 Tahun 2009 dan Hukum Islam”. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. 2021

Christianto, Giso. “*Ratio Legis* Hak Menguasai Negara Terhadap Sumber Daya Mineral dan Batubara”. *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Tarakan. 2022.

Mamase, Nur Akbar B. DG. “Penegakan Hukum Terhadap Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah”. *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2013.

Saputri, Defita Vionna. “Tinjauan Hukum Terhadap Penambangan Batu Gunung Ilegal Di Kabupaten Toraja Utara”. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Bosowa. 2022

Syah, Muhammad Taudin. “Penegakan hukum Terhadap penambangan Ilegal Bahan Galian Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kecamatan Kutablang”. *Skripsi*. Fakultas Syari’ah dan Hukum prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry banda Aceh. 2021.

## **MAJALAH**

Chakim, M. Lutfi. dkk. “Contrarius Actus”. Konstitusi. No. 126. Agustus 2017.

## **WAWANCARA**

Wawancara dengan Gusman Yusuf, S.T., M.T. Analisis pertambangan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral. 19 Maret 2025.